

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang. Jakarta*: Rajawali Pers, 2010.
- *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres, 2012.
- Dillah, H. Phillips dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Aditama, 2009.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan keenam*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hosein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Indarti, Maria Farida. *Ilmu perundang-undangan, jenis, fungsi dan materi muatan*, Yogyakarta: Kanisisus, 2007.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.
- *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 1998.
- Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara, Cetakan ketujuh*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- *Ilmu Negara edisi Revisi*. Jakarta: Gaya media Pratama, 2000.

- Latif, Abdul. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : Totalmedia, 2009.
- Maria farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Laica. *Berjalan di Ranah Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2015
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Soeriaatmadja, Arifin. *Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*. Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi. UU No. 24 Tahun 2003, LN No.98, TLN No.4316

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. UU No.8 Tahun 2011.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional. UU No. 24 Tahun 2000, LN No.185 Tahun 2000, TLN No.4012

III. JURNAL

Damos Domudi Agusman. "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI tinjauan dari Perspektif Praktik Indonesia." Jurnal Hukum Internasional. Volume 5 Nomor 3 (April:2008).

Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2 (September-Desember: 2012).

Ni Ketut Aprilyawathi. "Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional yang Bersifat Multilateral." Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.

Nurul Qamar. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi.Vol. I, No. 1, (November:2012).

Puspitawati, Dhiana dan Adi Kusumaningrum. "Reposisi Politik Hukum Perjanjian Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Hukum Di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Vol. 22 no.2 (Desember:2015).

IV. INTERNET

Gerald e. Songko. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969. Lex Privatum, vol. Iv/no. 4/apr/2016.
[Http://download.portalgaruda.org/article.php?article=431933&val=1003&title=kekuatan%20mengikat%20perjanjian%20internasional%20menurut%20konvensi%20wina%20tahun%201969](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=431933&val=1003&title=kekuatan%20mengikat%20perjanjian%20internasional%20menurut%20konvensi%20wina%20tahun%201969). Diakses pada 23 November 2016.

<http://kamusbahasaIndonesia.org/undang/mirip>KamusBahasaIndonesia.org.diakses Pada 6 Juni 2016 .

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2> , diakses pada 11 Januari 2017.

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses Pada 24 November 2016.

Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur KetatanegaraanIndonesia,<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index>

.php?page=web.Berita&id=11779#.WE-aubJ97IU, diakses pada 1 Desember 2016.

Lilik Mulyadi, Relevansi Dan Implementasi Teori Grotius Tentang pembentukan Perjanjian Internasional. <https://www.scribd.com/doc/86483418/Implementasi-Teori-Grotius>. Diakses pada 23 November 2015 pukul 17.08 WIB.